

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

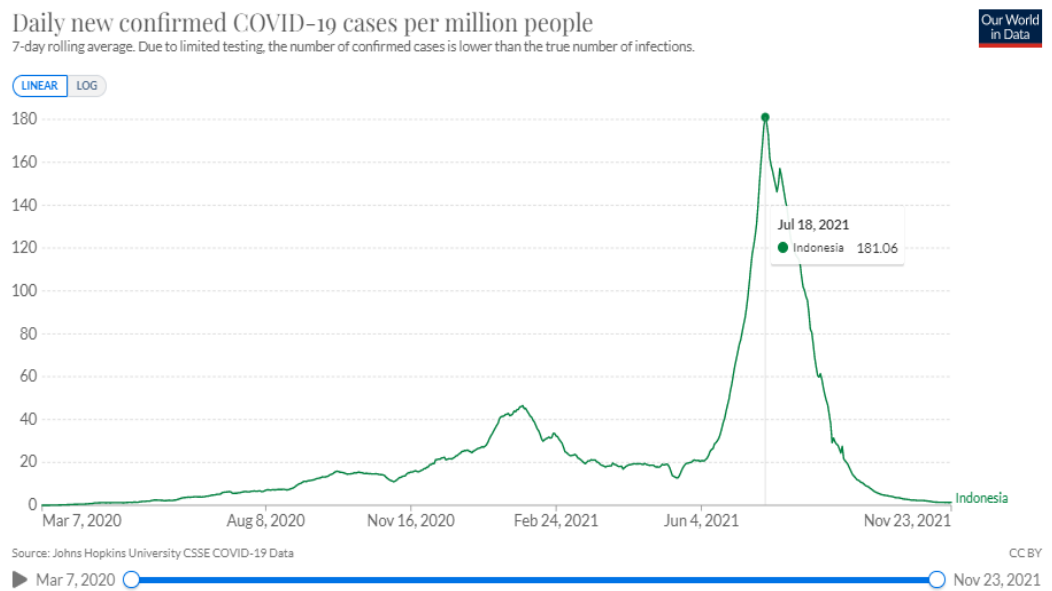
Sejak awal bulan Maret 2020 pertama kali virus corona atau bahasa medisnya Corona Virus Disease (Covid-19) ditemukan di Indonesia, hingga kini virus ini belum dapat dihentikan penyebarannya. Covid-19 adalah penyakit yang menjadi fenomenal menyita perhatian karena mengancam jiwa manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini sangat cepat dan bila tidak ditangani dengan cepat dan baik akan berakibat kematian, pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 ini sebagai bencana nasional. Penanganan pandemi Covid-19 ini telah mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional yang fokus untuk peningkatan perekonomian nasional bergeser untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampak ikutannya (Fernández-Pérez & Peña-García, 2021). Penanganan pandemi Covid-19 merupakan tantangan terhadap otonomi daerah, sebab hampir semua daerah di Indonesia dilanda wabah Covid-19 sehingga penanganannya memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Sampai dengan saat ini masyarakat yang terpapar Covid-19 masih terus bertambah, pemerintah terus bekerja keras untuk menangani dengan menerbitkan berbagai kebijakan pencegahan dan penyembuhan serta dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, namun belum berhasil (Moraci et al., 2020).

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) belum berakhir dan masih menjadi ancaman global. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), total kasus positif yang terkonfirmasi tepat satu tahun pandemi tanggal 11 Maret 2021 adalah 117.788.562 kasus (Uddin et al., 2020). Keadaan itu membuat sejumlah negara termasuk Indonesia terus berjuang untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Upaya pencegahan dengan melaksanakan protokol kesehatan terus digaungkan, tetapi angka kasus terkonfirmasi COVID-19 terus bertambah. Lonjakan kasus pun sempat terjadi beberapa kali di Indonesia yaitu pada bulan September 2020 dan Januari 2021 usai liburan panjang (Media Indonesia, 2021; Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021a). beberapa kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yaitu :

1. Work From Home
2. Pembelajaran melalui online
3. Pembatasan social berskala besar
4. Larangan mudik
5. New normal
6. PPKM
7. Sanksi bagi pelanggar protocol kesehatan

Tepat satu tahun pandemi COVID-19, akumulasi jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 1.403.722 (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021b).

Gambar 1.1 Kasus Covid-19 di Indonesia 7 Mei 2020-23 November 2021



Sumber : <https://ourworldindata.org/>

Berikut data angka jumlah kasus Covid-19 di Indonesia dari Maret 2020 sampai dengan November 2021, yang dimana angka kasus covid-19 yang terus merangkak naik hingga berada dipuncak tertinggi pada bulan Juli 2021.

Vaksinasi covid-19 menjadi salah satu upaya yang dilakukan dan digencarkan untuk mengatasi pandemi. Tidak hanya terkait dengan upaya

mencapai herd immunity atau kekebalan komunal, vaksinasi telah terbukti secara klinis memberikan perlindungan lebih saat terpapar covid-19.

Provinsi DKI Jakarta melalui beragam strategi mempermudah warga mendapatkan layanan vaksinasi antara lain pendaftaran vaksin melalui Jakarta Kini (JAKI), menyediakan mobil vaksin keliling dan sentra vaksin kolaborasi dengan berbagai pihak.

Upaya tersebut efektif mendorong vaksinasi secara cepat dan masif, bahkan target vaksinasi sebanyak 7,5 juta warga sasaran pada Agustus 2021 sebagaimana diminta Presiden RI Joko Widodo bukan hanya tercapai, tapi terlampaui dengan jumlah 8,5 juta orang divaksin di Jakarta per 9 Agustus 2021. Pencapaian ini membuat DKI Jakarta sebagai provinsi dengan cakupan vaksinasi tertinggi di Indonesia.

Keberhasilan ini diraih melalui kerja keras seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait serta antusiasme masyarakat.

Untuk menurunkan angka kasus, selain melakukan protokol kesehatan maka perlu dilaksanakan upaya perlindungan khusus yaitu dengan vaksinasi. Selama bertahun-tahun vaksin terbukti dapat menurunkan kejadian penyakit menular melalui mekanisme imunitas tubuh manusia (Islam et al., 2021). Vaksin COVID-19 dikembangkan untuk membantu pembentukan imunitas tubuh individu sehingga pemberian vaksin COVID-19 tersebut diharapkan dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity) yang nantinya berdampak pada penurunan jumlah kasus yang terinfeksi. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai pada tanggal 13 Januari 2021. Untuk gelombang pertama, vaksin tersebut diberikan ke tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Pada gelombang kedua, sasaran vaksinasi adalah masyarakat kelompok rentan dan masyarakat umum lainnya. Pemerintah menargetkan 181,5 juta orang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 pada Maret 2022 (Kemenkes RI, 2021). Untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, pemerintah Indonesia berusaha menjamin ketersediaan vaksin. Jenis vaksin yang telah dan akan digunakan di Indonesia adalah AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm dan Sinovac (Kemenkes RI, 2020a). Kelima jenis vaksin tersebut memiliki efikasi yang

berbeda-beda berdasarkan uji klinis yang telah dilakukan. WHO memaparkan bahwa kinerja vaksin dapat dilihat dari tiga pengukuran yaitu melalui efikasi, efektivitas, dan dampak vaksin (Surianta, 2021).

Efikasi vaksin mengukur penurunan risiko infeksi yang terjadi pada individu yang divaksin dalam situasi terkontrol. Data efikasi ini diperoleh dari uji klinis secara acak (*randomized control trial*). Sedangkan efektivitas vaksin mengukur pengurangan risiko infeksi yang terjadi pada individu yang divaksin terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di masyarakat atau dalam dunia nyata dengan menggunakan studi observasional. Selanjutnya dampak vaksin adalah pengurangan risiko infeksi atau penyakit pada populasi yang sebagian masyarakatnya sudah divaksin. Studi yang menunjukkan efektivitas vaksin di beberapa negara sudah dilakukan (Hu et al., 2021)(Luan et al., 2021)(Rao et al., 2021).

Akan tetapi, belum tersedia data yang memperlihatkan bagaimana dampak vaksin tersebut di masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan lima jenis vaksin yang digunakan. Studi yang mengukur dampak vaksin di populasi dilakukan di Inggris dengan menggunakan dua jenis vaksin yaitu AstraZeneca dan Pfizer ((Renaud, 2020). Pemerintah Indonesia sampai April 2021 menargetkan 40,3 juta orang sudah tervaksin dengan dosis lengkap (dua kali dosis penyuntikan). Selain kecepatan pemberian vaksin yang masih rendah, hal lain yang menyebabkan rendahnya cakupan vaksin COVID-19 adalah kurangnya penerimaan masyarakat terhadap vaksin itu sendiri. Harapan et al menemukan bahwa penerimaan vaksin akan lebih tinggi pada vaksin yang memiliki efikasi tinggi (Harapandi, 2022). Di tahap pertama, jenis vaksin yang banyak digunakan adalah Sinovac yang dianggap memiliki efikasi yang rendah. Jika merujuk pada kinerja vaksin menurut WHO maka kita membutuhkan informasi bagaimana dampak vaksin tersebut pada tingkat masyarakat. Salah satu upaya untuk memperoleh gambaran dampak vaksin di masyarakat adalah melalui pemodelan. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, pemodelan digunakan sebagai salah satu cara untuk memprediksi kondisi COVID-19 di Indonesia dengan kondisi yang dinamis, termasuk dengan bervariasinya jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan langkah-langkah

strategis terkait program vaksinasi untuk menurunkan risiko penularan COVID-19 di masyarakat.

Secara khusus dalam memandang Ibu kota Negara Republik Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta, ujian pandemi Covid masih jauh dari kata selesai. Karena hingga Bulan Desember 2020, atau 10 Bulan sejak kasus aktif Covid-19 pertama kali terdeteksi di Provinsi DKI Jakarta, belum terlihat sinyal pandemi akan mereda, atau setidaknya kurva gelombang pertama di DKI Jakarta juga belum berakhir. Pada hari Kamis, 3 September 2020, Satgas Covid-19 melaporkan adanya penambahan kasus baru sebanyak 1.359 yang berasal dari Jakarta (Covid UGM, 2020). Jumlah tersebut merupakan rekor penambahan kasus tertinggi pada tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, per Tanggal 3 September 2020, telah terkonfirmasi 184.268 kasus Covid-19, dengan 71,7% tingkat kesembuhan dan 4,2% pasien meninggal dunia. Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, berdasarkan laporan dari Satgas Covid 19 per tanggal 20 November 2020 Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah kasus terbanyak di Indonesia dengan presentase sebesar 25,4% diikuti Jawa Timur dengan presentase sebesar 11,9%, dan Jawa Barat sebesar 9,6%. Tingginya kasus yang terjadi di DKI Jakarta, menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi penyumbang terbanyak atas kasus konfirmasi positif Covid 19 di Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya, telah sigap mengatur pergerakan masyarakatnya melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyusun Peraturan Daerah terkait Covid-19 (Asmorowati et al., 2021), dan juga mengalokasikan bantuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas layanan bagi para penderita aktif Covid-19. Namun dengan melihat kepada betapa tajamnya kurva peningkatan kasus aktif di Provinsi DKI Jakarta, semestinya menjadi sinyal, bahwa ada yang kurang tepat dalam kebijakan penanganan Covid 19 di DKI Jakarta dengan kenyataan di lapangan yang tergambarkan oleh data harian Covid-19 (BNPB, 2020). Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.021/I/1727/2021, anak-anak berusia 12-17 tahun telah dapat menerima vaksinasi COVID-19, dengan tetap memprioritaskan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, lansia, petugas pelayanan publik, dan kelompok masyarakat rentan.

Maka dari itu DKI Jakarta gencar dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi bagi masyarakat (Nicolas, 2021).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus gencar melakukan vaksinasi Covid-19 kepada warga DKI Jakarta dan warga non DKI Jakarta yang melakukan aktivitas di Jakarta. Hingga saat ini, masih ada 1.916.655 warga DKI Jakarta yang belum divaksin Covid-19 dosis 1 dari total target vaksinasi sebanyak 8.941.211 warga Jakarta.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah melakukan vaksinasi dosis 1 sebanyak 10.643.267 orang atau 119% dari target 8,9 juta warga. Namun, dari jumlah tersebut, baru 66% merupakan warga berKTP DKI Jakarta atau sebanyak 7.024.556. Hal ini berarti masih ada 1,9 juta warga Jakarta yang perlu divaksin dosis 1.

Sementara untuk vaksinasi dosis 2 saat ini, kata Dwi, sudah mencapai mencapai 7.975.257 orang atau 89,2%, dengan proporsi 68% atau 5.423.174 orang merupakan warga ber-KTP DKI dan 32% atau 2.552.083 warga KTP Non DKI, dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka judul penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan Vaksinasi sebagai Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Vaksinasi sebagai Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Evaluasi Kebijakan Vaksinasi sebagai Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

#### **1.4 Fokus Penelitian**

Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana Evaluasi Kebijakan Vaksinasi sebagai Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

#### **1.5 Signifikasi Penelitian**

##### **1.5.1 Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini merupakan salah satu wujud penerapan dari teori William Dunn.

##### **1.5.2 Secara Praktis**

Melalui penelitian ini, dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

#### **1.6 Sistematika Penelitian**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Signifikasi penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan penelitian terdahulu dan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan tesis serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan analisis data.

##### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan Hasil Penelitian dan analisa sistem yang diusulkan serta pembahasan secara detail final elisitasi yang ada di bab sebelumnya, di jabarkan secara satu persatu dengan menerapkan konsep sesudah adanya sistem yang diusulkan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya